

Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Dampaknya terhadap Penagihan Piutang

(Studi Kualitatif: pada Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng)

Kadek Wimasri Pradnya Iswari^{1*}, Ni Kadek Sinawati², Nyoman Suadnyana Pasek³

¹⁻³Ekonomi dan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

*Penulis Korespondensi: iswaripradnya5@gmail.com

Abstract. *This research is motivated by the high level of uncollectible accounts at PERUMDA Air Minum Tirta Hita Buleleng, which impacts liquidity and public service quality. One of the main contributing factors is the uneven implementation of Good Corporate Governance (GCG) among all employees. This study aims to analyze the implementation of GCG and its impact on debt collection in an effort to minimize uncollectible accounts. The research method used is qualitative with a case study approach. Primary data were obtained through snowball sampling from key informants, including the board of directors and relevant department heads. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation, and documentation, which were then analyzed using the Miles and Huberman model (data reduction, data display, and conclusion drawing/verification). The results indicate that the implementation of GCG principles—comprising transparency, accountability, responsibility, independence, as well as fairness and equality—has been carried out well but is not yet fully optimal. The application of these principles has had a significant impact by making the collection process more systematic, structured, and data-driven. This contributes to improving collection effectiveness and arrears control. Nonetheless, challenges remain, such as a lack of customer payment discipline and uneven employee understanding of GCG. The conclusion of this research is that the consistent application of GCG plays a vital role in reducing uncollectible accounts; however, strengthening internal control and continuous education for employees are necessary to achieve maximum corporate financial sustainability.*

Keywords: *Accounts Receivable Management; Debt Collection; Good Corporate Governance; Regional Drinking Water Company Tirta Hita Buleleng; Uncollectible Accounts.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya piutang tak tertagih pada Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng yang berdampak pada likuiditas dan kualitas pelayanan public. Salah satu faktor penyebab utamanya adalah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang belum merata terhadap seluruh pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan GCG dan dampaknya terhadap penagihan piutang dalam upaya meminimalkan piutang tak tertagih. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui Teknik *Snowball Sampling* dari informan kunci yang meliputi direksi dan kepala bagian yang terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan model Milles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responabilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan yang telah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal. Penerapan prinsip-prinsip tersebut memberikan dampak signifikan dengan menjadikan proses penagihan lebih sistematis, terstruktur, dan berbasis data. Hal ini berkontribusi pada peningkatan efektivitas penagihan dan pengendalian tunggakan. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa kurangnya disiplin pembayaran pelanggan dan pemahaman pegawai yang belum merata mengenai GCG. Simpulan penelitian ini adalah penerapan GCG yang konsisten berperan penting dalam menekan angka piutang tak tertagih, namun diperlukan penguatan pengendalian internal dan edukasi berkelanjutan bagi pegawai untuk mencapai keberlanjutan keuangan Perusahaan yang maksimal.

Kata kunci: Manajemen Piutang; Penagihan Piutang; Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng; Piutang Tak Tertagih; Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

1. LATAR BELAKANG

Tingginya piutang tak tertagih pada Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng mencerminkan adanya permasalahan mendasar dalam pengelolaan keuangan perusahaan, khususnya pada aspek pengendalian dan penagihan piutang. Kondisi ini tidak hanya

berdampak pada terganggunya arus kas, tetapi juga berimplikasi pada penurunan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Piutang yang tidak segera tertagih menyebabkan dana perusahaan tertahan dalam bentuk klaim, sehingga menghambat pembiayaan operasional, pemeliharaan infrastruktur, serta pengembangan layanan. Dalam perspektif akuntansi, piutang merupakan bagian dari aset lancar yang seharusnya dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu tertentu, sehingga keberadaannya sangat menentukan likuiditas dan stabilitas keuangan perusahaan (Mulyadi, 2008).

Penjualan kredit menjadi strategi yang umum digunakan perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan dan memperluas jangkauan layanan. Namun, kebijakan ini juga membawa konsekuensi berupa risiko piutang tak tertagih apabila tidak didukung oleh sistem pengendalian yang efektif. Aktivitas penjualan pada dasarnya merupakan sumber utama peningkatan aset perusahaan, tetapi nilai ekonomisnya baru dapat dirasakan ketika piutang berhasil ditagih tepat waktu (Mulyadi, 2008). Oleh karena itu, pengelolaan piutang tidak hanya berkaitan dengan pencatatan transaksi, melainkan juga menyangkut kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko kredit secara menyeluruh.

Peran piutang dalam struktur keuangan perusahaan sangat strategis karena mencerminkan hak perusahaan atas penerimaan kas di masa depan. Ketidakpastian dalam penagihan piutang menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi perusahaan, terutama dalam menentukan besaran piutang yang benar-benar dapat ditagih. Permasalahan ini diperkuat oleh adanya beban piutang tak tertagih yang sulit diprediksi secara akurat, sehingga dapat menurunkan laba operasional dan mengganggu keseimbangan keuangan perusahaan (Skousen dkk., 2012). Selain itu, ketidakmampuan perusahaan dalam mengidentifikasi tingkat risiko piutang juga dapat memperbesar potensi kerugian yang harus ditanggung (Maajid, 2020).

Kondisi piutang tak tertagih juga berkaitan dengan berbagai faktor eksternal dan internal perusahaan. Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi pelanggan, rendahnya kesadaran pembayaran, hingga ketidakmampuan finansial pelanggan dalam memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, faktor internal seperti lemahnya sistem pengendalian, kurangnya pengawasan, serta tidak konsistennya penerapan kebijakan penagihan turut memperburuk kondisi tersebut. Piutang yang terus menumpuk akan memperpanjang siklus penagihan, sehingga dana perusahaan terikat dalam waktu yang lama dan mengurangi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan (Muhammad & Nurwani, 2022). Sebagai perusahaan daerah yang bergerak di bidang penyediaan air bersih, Perumda Air Minum memiliki tanggung jawab yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada pelayanan publik. Air bersih merupakan

kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara berkelanjutan, sehingga perusahaan dituntut untuk menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas layanan. Kebutuhan air bersih yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk menuntut perusahaan untuk memiliki sistem pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan (Salman, 2022). Dalam kondisi ini, gangguan terhadap arus kas akibat piutang tak tertagih dapat berdampak langsung terhadap kemampuan perusahaan dalam menjaga kualitas layanan.

Status Perumda sebagai Badan Usaha Milik Daerah mempertegas bahwa perusahaan harus mampu menyeimbangkan fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga harus menjaga kinerja keuangan agar tetap stabil dan berkelanjutan. Keseimbangan ini hanya dapat dicapai apabila perusahaan memiliki sistem tata kelola yang baik, yang mampu mengatur seluruh aktivitas operasional secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam konsep *Good Corporate Governance* yang menjadi landasan penting dalam pengelolaan perusahaan modern (Sapitri & Sinarwati, 2024).

Penerapan *Good Corporate Governance* menjadi sangat penting dalam pengelolaan piutang karena mampu menciptakan sistem yang lebih terstruktur dan terkontrol. Transparansi dalam penyajian informasi memungkinkan perusahaan untuk memantau posisi piutang secara akurat, sementara akuntabilitas memastikan adanya kejelasan tanggung jawab dalam proses penagihan. Selain itu, prinsip responsibilitas mendorong perusahaan untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan independensi dan kewajaran menjamin bahwa setiap keputusan diambil secara objektif tanpa adanya kepentingan tertentu (Kadek et al., 2021). Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang serta meminimalkan risiko piutang tak tertagih.

Pengawasan yang efektif merupakan salah satu aspek penting dalam GCG yang berhubungan langsung dengan pengelolaan piutang. Sistem pengawasan yang baik dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Transparansi dalam laporan keuangan, termasuk informasi mengenai piutang, juga dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Pengelolaan piutang yang didukung oleh prinsip GCG akan membantu perusahaan dalam meningkatkan likuiditas serta menjaga stabilitas keuangan dalam jangka panjang (Ningrat, 2022). Kelemahan dalam penerapan tata kelola perusahaan sering kali menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya piutang tak tertagih. Kurangnya transparansi dapat menyebabkan informasi piutang tidak

tersampaikan secara jelas, sehingga menyulitkan proses pengawasan. Akuntabilitas yang lemah juga dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, sehingga proses penagihan menjadi tidak optimal. Selain itu, ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggan yang menunggak dapat mengurangi efektivitas kebijakan penagihan dan memperbesar risiko terjadinya piutang tak tertagih.

Pengelolaan piutang yang tidak efektif akan berdampak luas terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selain menurunkan pendapatan, piutang tak tertagih juga meningkatkan biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk proses penagihan. Kondisi ini dapat menghambat kemampuan perusahaan dalam melakukan investasi serta pengembangan usaha, sehingga pertumbuhan perusahaan menjadi terhambat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengendalian piutang yang terintegrasi dengan penerapan GCG agar perusahaan dapat mengelola risiko secara lebih efektif dan efisien (Yani, 2020).

Analisis terhadap penerapan *Good Corporate Governance* dan dampaknya terhadap penagihan piutang menjadi penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi pengelolaan piutang dalam perusahaan. Pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara tata kelola perusahaan dan efektivitas penagihan piutang diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang relevan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan disiplin pembayaran pelanggan, serta optimalisasi penerapan prinsip GCG menjadi langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meminimalkan piutang tak tertagih dan menjaga keberlanjutan operasional perusahaan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* memandang perusahaan sebagai entitas yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan internal atau pemegang saham, tetapi juga harus memperhatikan seluruh pihak yang dapat memengaruhi maupun dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Stakeholder mencakup pelanggan, karyawan, pemasok, investor, pemerintah, hingga masyarakat luas, sehingga keberhasilan perusahaan tidak semata-mata ditentukan oleh capaian laba, tetapi juga oleh kemampuannya dalam mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingan tersebut secara seimbang (Freeman, 1984; Collins et al., 2021). Pandangan ini menempatkan perusahaan sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan manfaat yang lebih luas, bukan hanya bagi pemilik modal, tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang terlibat dalam keberlangsungan usahanya.

Perkembangan teori *stakeholder* menunjukkan adanya pergeseran dari orientasi yang hanya menekankan keuntungan finansial menuju pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu mempertimbangkan aspek sosial, etika, hukum, dan keberlanjutan. Dalam kerangka ini, aktivitas perusahaan harus dijalankan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial, kepatuhan terhadap aturan, serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan (Purba, 2023). Teori *stakeholder* juga dapat dipahami melalui tiga pendekatan utama, yaitu deskriptif, instrumental, dan normatif. Pendekatan deskriptif menjelaskan bagaimana perusahaan beroperasi di tengah berbagai kepentingan *stakeholder*, pendekatan instrumental menekankan bahwa pengelolaan *stakeholder* yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan, sedangkan pendekatan normatif menegaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral untuk memenuhi hak dan kepentingan *stakeholder* (Lawrance & Weber, 2020).

Penerapan teori *stakeholder* dalam manajemen modern menekankan pentingnya membangun hubungan yang harmonis, terintegrasi, dan berkelanjutan antara perusahaan dan para *stakeholder*. Hubungan tersebut tidak lagi bersifat transaksional jangka pendek, tetapi diarahkan pada kemitraan yang saling menguntungkan dan mampu mendukung kesinambungan usaha dalam jangka panjang (Budimanta et al., 2023). Pengelolaan *stakeholder* yang efektif dapat membantu perusahaan meminimalkan konflik, meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat loyalitas pelanggan, serta menciptakan lingkungan usaha yang lebih stabil. Oleh karena itu, teori *stakeholder* menjadi landasan penting bagi perusahaan dalam merancang kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian ekonomi, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial dan keberlanjutan usaha secara menyeluruh (Robbins & Coulter, 2021).

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem tata kelola perusahaan yang berfungsi mengarahkan, mengatur, dan mengendalikan perusahaan agar mampu menjalankan kegiatan usaha secara sehat, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Penerapan GCG menjadi sangat penting karena tidak hanya menjaga keseimbangan antara kewenangan manajemen dan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan. GCG dipahami sebagai suatu sistem yang dibangun melalui budaya organisasi, nilai-nilai, kebijakan, proses kerja, dan struktur perusahaan agar keputusan yang dihasilkan lebih efektif serta mampu mengelola risiko secara tepat dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* (Indra Surya, 2006). Dalam konteks Badan Usaha

Milik Daerah, penerapan tata kelola yang baik juga menjadi tuntutan regulatif dan administratif agar perusahaan dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan (Sapitri & Sinarwati, 2024).

Ruang lingkup GCG mencakup lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, yang saling berkaitan dalam membentuk sistem pengelolaan perusahaan yang baik. Transparansi menekankan keterbukaan informasi dan kejelasan dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan akuntabilitas menuntut adanya kejelasan fungsi, struktur, dan pertanggungjawaban agar pengelolaan perusahaan berjalan efektif (Emirzon, 2006). Responsibilitas menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan prinsip korporasi yang sehat, independensi menuntut pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa intervensi yang tidak semestinya, dan kewajaran menekankan perlakuan yang adil kepada seluruh *stakeholder*. Penerapan prinsip-prinsip tersebut membuat perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga pada pembentukan sistem kerja yang etis, tertib, dan dapat dipercaya oleh pihak internal maupun eksternal. Kejelasan pembagian tugas dan hubungan yang kondusif antarpemangku kepentingan juga menunjukkan bahwa GCG berperan penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan secara menyeluruh (Afdal Kurniawan Jamaludin et al., 2024).

Pentingnya GCG semakin terlihat dalam pengelolaan piutang dan pengendalian perusahaan secara keseluruhan, karena tata kelola yang baik akan menghasilkan pengawasan yang lebih efektif, meminimalkan konflik kepentingan, dan mendukung keakuratan laporan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas yang baik akan membantu perusahaan mengelola piutang secara lebih efisien, mempercepat identifikasi masalah penagihan, serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan keuangan (Ningrat, 2022). Mekanisme pengawasan yang kuat juga mampu menekan risiko kredit, meningkatkan likuiditas, dan menjaga kesehatan finansial perusahaan dalam jangka panjang (Kadek et al., 2021). Nilai tambah dari penerapan GCG tidak hanya terlihat pada perbaikan citra perusahaan, tetapi juga pada pengurangan *agency cost*, peningkatan kepuasan pelanggan, penguatan etika perusahaan, serta terbentuknya fondasi usaha yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan (Moh. Wahyudin Zarkasyi, 2008; Handayani & Darmawan, 2024).

Pengertian Piutang

Piutang merupakan salah satu komponen penting dalam akuntansi keuangan yang mencerminkan klaim perusahaan terhadap pihak lain atas transaksi yang telah terjadi. Piutang umumnya timbul akibat penjualan barang atau jasa secara kredit, sehingga perusahaan memiliki hak untuk menerima pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Secara konseptual, piutang dapat dipahami sebagai pembiayaan dalam bentuk tagihan jangka pendek yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan (Resti Sarah, 2020). Selain itu, piutang juga diartikan sebagai tagihan kepada pihak tertentu akibat transaksi penjualan kredit atau pemberian jasa, yang menjadi bagian dari aset lancar perusahaan dan memiliki nilai finansial yang signifikan (Anggadini, 2014). Keberadaan piutang ini tidak hanya mencerminkan aktivitas operasional perusahaan, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan suatu entitas (Afriani & Widyaningsih, 2023).

Peran piutang dalam perusahaan sangat strategis karena berkaitan langsung dengan arus kas dan likuiditas. Pengelolaan piutang yang efektif menjadi kebutuhan utama agar perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan dan kelangsungan operasionalnya. Dalam praktiknya, perusahaan perlu menerapkan kebijakan kredit yang tepat, sistem pengawasan yang kuat, serta proses penagihan yang efisien untuk meminimalkan risiko piutang tak tertagih (Husna, 2015). Strategi pengelolaan yang baik juga memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan penerimaan kas serta mengurangi potensi kerugian akibat gagal bayar (Rachman, 2019). Selain itu, pencatatan dan pemantauan piutang yang akurat memberikan informasi yang penting bagi pihak internal maupun eksternal, seperti investor, kreditur, dan pemerintah, dalam menilai kinerja keuangan perusahaan serta mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul (Aimbu et al., 2021).

Piutang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain piutang dagang, piutang wesel, piutang usaha, dan piutang lain-lain, yang masing-masing memiliki karakteristik dan perlakuan akuntansi yang berbeda (Rachmanto & Kusumawardana, 2013). Piutang dagang muncul dari penjualan kredit, sedangkan piutang wesel berkaitan dengan penggunaan instrumen wesel sebagai bukti utang. Piutang usaha dan piutang lain-lain mencerminkan klaim perusahaan di luar transaksi penjualan utama (Parijo & Utomo, 2016). Pengelompokan ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dalam laporan keuangan serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dalam konteks pengelolaan, piutang juga berkaitan erat dengan penerapan Good Corporate Governance, di mana transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan berperan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan piutang serta mengurangi risiko piutang tak tertagih (Warren et al., 2017). Pengawasan yang baik terhadap piutang akan berkontribusi pada peningkatan likuiditas dan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan (Fahmi, 2014).

Efektivitas Piutang

Efektivitas sering dikaitkan dengan efisiensi dalam mencapai tujuan suatu organisasi ataupun dalam Perusahaan. Sementara tujuan ataupun saran yang telah didapat seperti yang direncanakan dapat dianggap efektif namun belum tentu efisien suatu pekerjaan yang tidak diselesaikan dalam waktu yang ditentukan dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas adalah suatu gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dan hubungan antara nilai- nilai yang berbeda (Krisdayanti, 2021).

Berdasarkan Amirullah dan Hanafi efektivitas adalah suatu kemampuan Perusahaan untuk mencapai sasaran- sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara tetap (Amirullah & Hanafi, 2002). Sedangkan menurut Handoko, efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tetap untuk pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi kesimpulannya dari hal diatas mengenai pengertian efektivitas adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan benar untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dari pengertian efektivitas diatas dapat penulis simpulkan bahwa efektivitas piutang merupakan suatu kemampuan di Perusahaan untuk mengelola piutangnya dengan benar agar bertujuan untuk mencapai Tingkat perputaran piutang serta rata- rata piutang yang diharapkan.

Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih merupakan salah satu bentuk kerugian pendapatan yang timbul ketika perusahaan tidak lagi mampu menagih sebagian atau seluruh piutang usaha dari pelanggan. Dalam akuntansi, kondisi ini mengakibatkan penurunan nilai aset, khususnya pada akun piutang usaha, dan pada saat yang sama juga berpengaruh terhadap penurunan laba perusahaan serta ekuitas pemegang saham. Keberadaan piutang tak tertagih menunjukkan bahwa tidak seluruh penjualan kredit dapat dikonversi menjadi kas sesuai waktu yang diharapkan. Situasi ini umumnya terjadi ketika pelanggan mengalami penurunan kondisi ekonomi, kebangkrutan, atau ketidakmampuan memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, piutang tak tertagih tidak hanya menjadi persoalan pencatatan akuntansi, tetapi juga mencerminkan adanya risiko nyata dalam kebijakan penjualan kredit perusahaan (Karamoy & Grace, 2014).

Dampak piutang tak tertagih terhadap kondisi keuangan perusahaan sangat signifikan karena kerugian tersebut harus diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi. Semakin besar jumlah piutang yang tidak dapat ditagih, maka semakin besar pula beban kerugian piutang yang harus ditanggung perusahaan, sehingga laba operasional yang diperoleh menjadi semakin kecil.

Kondisi ini tentu merugikan perusahaan, terutama karena tujuan utama kegiatan usaha pada umumnya adalah memperoleh laba secara optimal. Kerugian piutang tak tertagih juga menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi risiko dalam manajemen kredit, khususnya apabila proses pemberian kredit tidak didukung oleh analisis yang memadai terhadap kemampuan bayar pelanggan. Dalam hal ini, piutang tak tertagih dapat dipahami sebagai akun yang terbentuk dari taksiran piutang yang diperkirakan tidak dapat dipulihkan kembali, sehingga perlu dikelola secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas keuangan perusahaan (Faradhilah, 2007).

Risiko piutang tak tertagih pada dasarnya tidak selalu dapat ditentukan secara pasti sejak awal, karena kegagalan pelanggan membayar pada saat jatuh tempo belum tentu langsung menunjukkan bahwa piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih. Penetapan suatu piutang menjadi piutang tak tertagih memerlukan pertimbangan yang cermat, sebab tidak ada satu aturan umum yang sepenuhnya pasti untuk menentukan kapan piutang harus dinyatakan tidak tertagih (Kieso, 2018). Meski demikian, terdapat beberapa indikator yang dapat menjadi petunjuk kuat, seperti kebangkrutan pelanggan, penutupan usaha debitur, atau gagalnya berbagai upaya penagihan setelah dilakukan berulang kali. Apabila piutang telah ditetapkan sebagai piutang tak tertagih, maka piutang tersebut tidak lagi layak dicatat sebagai aset dan harus dikeluarkan dari pos piutang dalam neraca. Pada saat yang sama, perusahaan wajib mencatatnya sebagai beban piutang tak tertagih dalam laporan laba rugi agar laporan keuangan tetap mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Pengelolaan piutang tak tertagih membutuhkan sistem pengendalian yang baik, karena masalah ini tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal dari pelanggan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kelemahan internal perusahaan. Kurangnya prosedur operasional standar, lemahnya analisis kredit, dan tidak optimalnya pengawasan terhadap piutang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya piutang tak tertagih. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memiliki SOP yang jelas sejak tahap pemberian kredit, pemantauan umur piutang, hingga proses penagihan dan penghapusan piutang. Kejelasan prosedur tersebut akan membantu perusahaan dalam menekan risiko kerugian, meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang, dan memastikan bahwa setiap keputusan terkait piutang dilakukan secara lebih terukur dan bertanggung jawab. Penerapan SOP yang baik juga akan mendukung manajemen dalam mengelola piutang tak tertagih secara lebih efektif dan sistematis (Sinarwati, Adiputra, & Telagawathi, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami secara mendalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan dampaknya terhadap efektivitas penagihan piutang pada Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena secara komprehensif dalam kondisi alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama yang berfokus pada makna, pandangan, dan pengalaman informan (Sugiyono, 2011). Fokus penelitian diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajiban, khususnya dalam proses pengelolaan dan penagihan piutang. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara tata kelola perusahaan dan efektivitas penagihan piutang di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng.

Lokasi penelitian berada di Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng yang beralamat di Jalan Melati No. 10, Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang penyediaan air bersih bagi masyarakat, sekaligus sebagai objek yang relevan untuk menelaah penerapan GCG dalam pengelolaan piutang. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap informan kunci, seperti direksi, kepala bagian terkait, dan staf yang terlibat langsung dalam penagihan piutang. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan keuangan piutang tak tertagih dan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) penagihan piutang, yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat hasil temuan lapangan (Sekaran dalam Sartika & Sjendry, 2016).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi agar informasi yang diperoleh lebih lengkap dan saling mendukung. Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur untuk memberi ruang bagi peneliti dalam menggali informasi lebih luas sesuai jawaban informan (Sutrisno Hadi, 1989), sedangkan observasi digunakan untuk melihat secara langsung praktik penagihan piutang, alur kerja, dan lingkungan operasional perusahaan (Suharsimi Arikunto, 2021). Dokumentasi berfungsi sebagai sumber pendukung berupa arsip, catatan, dan laporan yang relevan (Sugiyono, 2015). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, sehingga hasil penelitian dapat disusun secara sistematis, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Miles & Huberman, 1992).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng pada dasarnya telah mengacu pada lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Kelima prinsip tersebut telah menjadi dasar dalam pengelolaan piutang dan pelaksanaan penagihan kepada pelanggan. Dalam praktiknya, perusahaan telah memiliki aturan, sistem, dan pembagian kerja yang mendukung pelaksanaan tata kelola yang lebih baik. Meskipun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa penerapan tersebut belum berjalan sepenuhnya optimal di semua bagian. Masih terdapat kendala baik dari sisi internal maupun eksternal yang memengaruhi efektivitas implementasi GCG dalam menekan piutang tak tertagih. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa GCG sudah diterapkan dengan cukup baik, tetapi masih membutuhkan penguatan agar dampaknya terhadap pengendalian piutang menjadi lebih maksimal. Pada aspek transparansi, hasil penelitian memperlihatkan bahwa Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng telah berupaya menyediakan keterbukaan informasi kepada pelanggan maupun kepada pihak internal perusahaan. Informasi mengenai tagihan, status pembayaran, dan posisi piutang sudah dapat diakses melalui sistem yang terintegrasi, sehingga pelanggan dapat memantau kewajibannya secara lebih mudah. Kondisi ini sangat membantu dalam menciptakan kejelasan informasi dan mengurangi potensi terjadinya kesalahpahaman antara pelanggan dengan perusahaan. Transparansi juga tidak hanya diwujudkan dalam bentuk akses data, tetapi juga melalui forum komunikasi dengan pelanggan yang berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi dan penanganan keluhan. Dari temuan ini dapat dipahami bahwa keterbukaan informasi memberikan kontribusi besar terhadap kelancaran proses penagihan, karena pelanggan mengetahui secara jelas jumlah tagihan dan konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Oleh sebab itu, prinsip transparansi terbukti menjadi fondasi awal yang penting dalam mendukung tata kelola penagihan piutang yang lebih tertib dan dapat dipercaya .

Pada prinsip akuntabilitas, penelitian menemukan bahwa perusahaan telah memiliki pedoman kerja berupa SOP dan SK Direksi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas seluruh bagian yang terlibat dalam pengelolaan piutang. Kejelasan pedoman ini membuat setiap pegawai memahami batas tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Bagian penagihan, bagian keuangan, dan bagian akuntansi telah memiliki peran yang terpisah namun saling berkaitan, sehingga proses kerja dapat berjalan lebih terstruktur. Selain itu, setiap hasil penagihan di lapangan harus dilaporkan dan dicocokkan dengan data yang tercatat di

dalam sistem. Hal ini menunjukkan bahwa proses penagihan tidak hanya dijalankan secara administratif, tetapi juga diawasi agar setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, akuntabilitas di Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng telah diwujudkan melalui kejelasan mekanisme kerja, dokumentasi kegiatan, dan pengawasan yang mendukung tertibnya pengelolaan piutang.

Dari sisi responsibilitas, penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah berupaya menjalankan pengelolaan piutang sesuai dengan ketentuan internal dan standar akuntansi yang berlaku. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut terlihat dalam penerapan SAK ETAP untuk pencatatan, evaluasi, dan pencadangan piutang tak tertagih. Piutang yang dinilai berisiko tidak tertagih tidak langsung dihapuskan, melainkan terlebih dahulu dievaluasi berdasarkan umur piutang dan kemungkinan penagihannya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada penagihan secara operasional, tetapi juga menjaga ketepatan dan kewajaran penyajian laporan keuangan. Selain itu, tanggung jawab perusahaan juga tercermin dari konsistensi pelaksanaan sanksi administratif sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, prinsip responsibilitas dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa perusahaan berusaha menjalankan kewajiban pengelolaan piutang secara taat aturan, baik dari sisi administratif maupun keuangan.

Prinsip independensi dalam penelitian ini tampak dari pelaksanaan penagihan yang dilakukan berdasarkan data dan sistem, bukan atas dasar pertimbangan pribadi ataupun hubungan tertentu dengan pelanggan. Seluruh tindakan penagihan mengacu pada informasi yang dihasilkan oleh sistem, seperti data tunggakan, hasil pembacaan meter, dan laporan pembayaran pelanggan. Dengan mekanisme tersebut, keputusan penagihan menjadi lebih objektif dan tidak mudah dipengaruhi oleh intervensi pihak tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem yang terintegrasi tidak hanya mempermudah kerja petugas, tetapi juga menjaga profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Tidak adanya perlakuan khusus terhadap pelanggan tertentu menjadi indikator penting bahwa perusahaan berupaya menerapkan prinsip independensi secara nyata. Oleh karena itu, independensi dapat dinilai telah mendukung terciptanya proses penagihan yang lebih adil, konsisten, dan sesuai dengan prinsip GCG. Pada prinsip kewajaran dan kesetaraan, penelitian memperlihatkan bahwa perusahaan telah memberlakukan perlakuan yang sama kepada seluruh pelanggan sesuai dengan klasifikasi tarif dan aturan yang berlaku. Setiap pelanggan dikenakan tarif berdasarkan golongan yang telah ditetapkan, seperti rumah tangga, niaga, sosial, atau instansi, tanpa adanya perlakuan khusus di luar ketentuan. Demikian pula dalam penerapan sanksi administratif, perusahaan menerapkan

tahapan yang sama kepada pelanggan yang menunggak. Pelanggan diberi peringatan terlebih dahulu, kemudian disegel, ditutup sementara, hingga pencabutan permanen apabila tunggakan tidak diselesaikan. Pola ini menunjukkan bahwa perusahaan berupaya menegakkan aturan secara adil sekaligus tetap memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, kewajaran dan kesetaraan dalam penelitian ini tidak hanya tampak pada aturan tertulis, tetapi juga pada praktik operasional yang menempatkan semua pelanggan dalam posisi yang sama di hadapan kebijakan perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG memberikan dampak yang positif terhadap efektivitas penagihan piutang. Dengan adanya sistem yang lebih transparan dan pembagian tugas yang jelas, proses penagihan menjadi lebih terarah, terstruktur, dan mudah diawasi. Penagihan tidak lagi hanya bergantung pada kebiasaan kerja lapangan, tetapi sudah ditopang oleh data dan prosedur yang lebih sistematis. Hal ini berdampak pada meningkatnya ketertiban dalam pencatatan, pelaporan, dan pengawasan hasil penagihan. Dalam konteks ini, GCG tidak hanya berfungsi sebagai konsep tata kelola, melainkan benar-benar menjadi kerangka kerja yang memperbaiki proses pengendalian piutang. Oleh karena itu, penerapan GCG dapat dipahami sebagai faktor penting yang mendorong efektivitas penagihan sekaligus memperkuat stabilitas pengelolaan keuangan perusahaan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga mengungkapkan adanya sejumlah kendala yang masih menghambat efektivitas penagihan piutang. Salah satu kendala utama berasal dari rendahnya kedisiplinan pelanggan dalam membayar tagihan tepat waktu. Selain itu, kondisi ekonomi pelanggan, kebangkrutan, meninggal dunia, hingga perpindahan kepemilikan pelanggan lama kepada pelanggan baru juga menjadi penyebab munculnya piutang yang sulit tertagih. Dari sisi internal, penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pegawai terhadap prinsip GCG belum sepenuhnya merata, sehingga implementasi di lapangan masih memerlukan evaluasi dan penguatan. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa efektivitas penagihan tidak hanya ditentukan oleh sistem dan aturan, tetapi juga oleh perilaku pelanggan serta kualitas pelaksanaan dari sumber daya manusia yang menjalankannya. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa perbaikan pengelolaan piutang harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi tata kelola internal maupun pendekatan kepada pelanggan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sanksi administratif memiliki peran penting dalam mendukung pengurangan piutang tak tertagih. Sanksi tersebut diterapkan secara bertahap, mulai dari denda administratif, penyegehan meter air, penutupan sementara, hingga pencabutan permanen bagi pelanggan yang terus menunggak. Dalam pembahasan, mekanisme

ini dipahami sebagai bentuk penegakan aturan yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas, responsibilitas, dan kewajiban. Sanksi administratif tidak semata-mata dimaksudkan untuk menghukum pelanggan, tetapi juga sebagai alat kontrol agar pelanggan terdorong untuk menyelesaikan kewajibannya. Efektivitas sanksi ini terlihat dari kenyataan bahwa banyak pelanggan memilih membayar tagihan ketika telah memasuki tahap denda atau penyeselan. Oleh sebab itu, penerapan sanksi administratif dapat dinilai sebagai instrumen penting dalam tata kelola penagihan piutang yang berbasis GCG.

Secara keseluruhan, pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan GCG di Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng memiliki peran yang signifikan dalam memperbaiki proses penagihan piutang dan menekan risiko piutang tak tertagih. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajiban dan kesetaraan telah membantu menciptakan proses penagihan yang lebih sistematis, objektif, dan tertib. Namun, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi GCG masih perlu ditunjang oleh peningkatan pengawasan internal, pemerataan pemahaman pegawai, dan edukasi yang berkelanjutan kepada pelanggan. Dengan penguatan pada aspek-aspek tersebut, perusahaan akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini pada akhirnya memperlihatkan bahwa GCG bukan sekadar prinsip normatif, melainkan instrumen praktis yang mampu memperkuat pengelolaan piutang jika diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, pengembangan tata kelola yang berkelanjutan menjadi kebutuhan penting bagi Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng untuk mencapai stabilitas keuangan dan pelayanan yang optimal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa tingginya piutang tak tertagih di Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng merupakan masalah nyata yang berdampak langsung terhadap arus kas, stabilitas operasional, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tunggakan pelanggan yang bernilai signifikan tidak hanya menjadi beban administratif, tetapi juga memperlemah kondisi keuangan perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara umum telah berjalan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Prinsip transparansi terlihat dari keterbukaan data tagihan dan tunggakan, akuntabilitas tercermin dalam adanya SOP dan SK Direksi, responsibilitas diwujudkan melalui sanksi administratif bertahap,

independensi tampak dari pengambilan keputusan berbasis sistem dan data, serta kewajaran dan kesetaraan diterapkan melalui perlakuan yang sama kepada seluruh pelanggan sesuai aturan yang berlaku.

Di sisi lain, peningkatan piutang tak tertagih tidak hanya dipengaruhi oleh kelemahan internal perusahaan, tetapi juga oleh faktor eksternal. Dari sisi internal, kendala muncul akibat kesalahan teknis dalam pembacaan meter, keterlambatan koreksi data, dan belum meratanya pemahaman pegawai mengenai prinsip GCG. Sementara itu, dari sisi eksternal, kondisi ekonomi pelanggan dan rendahnya disiplin pembayaran turut memperbesar risiko tunggakan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa apabila penerapan GCG tidak dioptimalkan, maka kondisi piutang tak tertagih dapat semakin memburuk. Namun, ketika prinsip-prinsip GCG dijalankan secara lebih konsisten melalui sistem yang terintegrasi, pembagian tugas yang jelas, dan pengawasan yang lebih baik, efektivitas penagihan menunjukkan perbaikan, sehingga GCG terbukti tidak hanya sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai instrumen manajerial yang nyata dalam memperkuat pengendalian piutang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng disarankan untuk terus memperkuat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan menyeluruh dalam setiap aktivitas pengelolaan piutang. Penguatan tersebut tidak hanya dilakukan pada aspek sistem dan prosedur, tetapi juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, *workshop*, sosialisasi, serta penguatan pemahaman mengenai kode etik dan pedoman kerja. Nilai-nilai GCG sebaiknya tidak hanya disampaikan secara formal, tetapi juga diintegrasikan dalam budaya kerja sehari-hari agar seluruh pegawai mampu menerapkannya secara nyata dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, bagian penagihan, keuangan, dan akuntansi perlu meningkatkan koordinasi, evaluasi rutin, serta sinkronisasi data agar proses penagihan dan pencatatan piutang berjalan lebih efektif, tertib, dan sesuai prosedur. *Monitoring* terhadap pelanggan yang menunggak, khususnya yang telah melewati batas waktu tertentu, juga perlu dilakukan secara lebih proaktif agar risiko piutang tak tertagih dapat ditekan sejak dini.

Di sisi lain, pelanggan juga perlu diberikan edukasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pembayaran tagihan air secara tepat waktu, baik untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan maupun untuk menjaga keberlanjutan kualitas pelayanan publik. Transparansi informasi tagihan yang telah tersedia perlu dimanfaatkan secara optimal oleh pelanggan, sehingga mereka dapat mengetahui kewajibannya lebih awal dan menghindari

terjadinya tunggakan. Sosialisasi mengenai sanksi administratif juga perlu dilakukan secara jelas dan berkelanjutan agar pelanggan memahami konsekuensi dari keterlambatan pembayaran. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih luas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara statistik pengaruh penerapan GCG terhadap penurunan piutang tak tertagih. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas sistem pengendalian internal, kualitas pengawasan manajerial, maupun strategi peningkatan kepatuhan pelanggan dalam pembayaran tagihan.

DAFTAR REFERENSI

- Amrie, A., et al. (2013). Piutang usaha tak tertagih: Kerugian pendapatan dan pencatatan jurnal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 45–60.
- Afdal Kurniawan Jamaludin, A. A., Agus Abdul Aziz, A., Arwin Yafi Rahmatullah, D., Dimas Aprilian, D., & M. Sandi Surya Erlangga. (2024). Analysis of the implementation of the principles of good corporate governance on public perception and financial performance at the regional drinking water company (PDAM) of Palopo City. *International Journal of Sociology of Religion*, 1(2), 177–186. <https://doi.org/10.70687/ijsr.v1i1.14>
- Amrie, A., et al. (2023). Piutang usaha tak tertagih: Kerugian pendapatan dan pencatatan jurnal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 45–60.
- Anjarsari. (2021). Pengendalian internal dalam pengelolaan piutang. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 10(2), 45–60.
- Agrawal, A., & Knoeber, C. R. (2022). Firm performance and the role of corporate governance. *Journal of Corporate Finance*, 68, 101–120.
- Afriani, R. I., & Widyaningsih, I. U. (2023). Mengukur evaluasi penerapan SAK EMKM pada kinerja keuangan mikro. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Tirtayasa (JRBMT)*, 7(1), 17–26. <https://doi.org/10.48181/jrbmt.v7i1.23883>
- Aimbu, G., Karamoy, H., & Tangkuman, S. J. (2021). Analisis pengendalian piutang untuk meminimalkan risiko piutang tak tertagih pada PT Samudera Mandiri Sentosa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 366–374. <https://doi.org/10.32400/gc.16.4.37263.2021>
- Aggadini, S. D. (2014). *Manajemen keuangan: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Amirullah, M., & Hanafi. (2002). *Manajemen keuangan: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Arikunto, S. (2021). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2022). *Fundamentals of financial management*. Cengage Learning.
- Budimanta, P., & Rudito. (2023). *Manajemen strategis dan teori stakeholder*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). The impact of internship programs on student competency. *Journal of Educational Research*, 29(3), 167–186.
- Dahlia. (2021). Analisis pengendalian piutang untuk meminimalkan piutang tak tertagih PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Mejene. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 15–30.
- Daryati, R. (2021). Efektivitas pengelolaan piutang dalam mencapai tujuan perusahaan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 12(3), 75–85.
- Demak, Y. K., Tinangon, J. J., & Mawikere, L. (2018). Analisis piutang tak tertagih berdasarkan umur piutang pada PT. Air Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 347–355. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21151.2018>
- Daniri, M. A. (2005). *Good corporate governance: Konsep dan implementasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Eisenhardt, K. M. (2021). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Ery, G., Taroyana, P., Atmadja, A. T., & Sri, D. N. (2025). The moderating role of good corporate governance on the effect of ESG risk and dividend policy on stock prices. *Journal*, 5(6), 6368–6379.
- Fahmi, I. (2014). *Analisa kinerja keuangan*. Alfabeta.
- Fontaine, R., et al. (2021). *Stakeholder theory: Its nature and role in ethical decision making*. Business Ethics Quarterly.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2022). *Manajemen strategis dan stakeholder*. BPFE Yogyakarta.
- Harian Saint. (2009). Implementasi good corporate governance di Indonesia. *Harian Saint*.
- Husna, R. M. (2015). Pengelolaan piutang yang efektif dalam upaya meningkatkan rentabilitas dan menjaga likuiditas (Studi kasus pada Unit Simpan Pinjam KUD Tani Wilis Kec. Sendang Kab. Tulungagung Periode 2012–2014). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 24(2).
- Hadi, S. (1989). *Metodologi research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Handayani, P. A., & Darmawan, N. A. S. (2024). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja pengelolaan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 15(02 SE-Articles), 448–463. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/78367>
- Imam Syaputra. (2002). *Corporate governance: Teori dan praktik*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Indrawan, A. S., Nyoman, D., Werastuti, S., & Adiputra, I. M. P. (2026). The influence of good corporate governance and corporate social responsibility on tax avoidance with political connections as a moderating variable. *Journal*, 6(6), 6030–6040.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kusumadewi, R. (2022). Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng: Tanggung jawab sosial dan ekonomi. *Jurnal Sumber Daya Air*, 6(2), 100–115.
- Kadek, N., Sawitri, U., Wahyuni, M. A., Ekonomi, J., & Akuntansi, P. S. (2021). Pengaruh good corporate governance dan modal. 1, 601–614.

- Kohler, A. (2000). Definisi kredit dan implikasinya dalam bisnis. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 22–30.
- Krisdayanti. (2021). *Pengelolaan piutang dalam perusahaan: Teori dan praktik*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2012). *Intermediate accounting* (14th ed.). John Wiley & Sons.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate accounting* (16th ed.). John Wiley & Sons.
- Karamoy, J., & Grace. (2014). *Manajemen keuangan: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Penerbit DEF.
- Lawrance, T., & Weber, J. (2020). *Stakeholder engagement and corporate performance*. Wiley.
- Maajid. (2020). Pengelolaan piutang dan risiko tak tertagih. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 9(3), 30–50.
- Mulyadi. (2008). Pengertian penjualan dan peranannya dalam perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 7(1), 10–20.
- Munadar, dkk. (2018). *Akuntansi keuangan menengah*. Jakarta: Penerbit ABC.
- OECD. (2023). *OECD guidelines on corporate governance of state-owned enterprises*. OECD Publishing.
- Purba, J. (2023). *Teori stakeholder dan implementasinya dalam bisnis berkelanjutan*. Penerbit Gramedia.
- Ningrat, A. B. (2022). Pengaruh mekanisme good corporate governance, kualitas audit, dan motivasi kontrak utang terhadap... *Journal*, 8(2), 243–252.
- Parijo, V., & Utomo, B. B. (2016). Analisis perlakuan akuntansi piutang pada usaha simpan pinjam. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1). <https://doi.org/10.26418/jppk.v5i1.13429>
- Sapitri, S. A. D., & Sinarwati, N. K. (2024). Mengungkap fenomena kredit macet pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ditinjau dari good corporate governance (Studi di Bumdes Artha Krama Mandiri). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14(2), 256–269. <https://doi.org/10.23887/jiah.v14i2.78189>